

Statistik Keuangan Daerah Sulawesi Tengah

2015/2016



Statistik Keuangan Daerah Sulawesi Tengah

2015/2016



STATISTIK KEUANGAN DAERAH SULAWESI TENGAH 2015/2016

Katalog : 7203002.72
ISSN : 2354-7456
No. Publikasi : 72540.1606
Ukuran Buku : 21.4 x 27.9 cm
Jumlah Halaman : x + 50 Halaman

Naskah :
Bidang Statistik Distribusi

Penyunting :
Bidang Statistik Distribusi

Gambar Kulit :
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh :
©Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Dicetak Oleh :
Percetakan Rio Palu

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang disajikan secara series untuk tahun anggaran 2014 - 2015, merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun sebelumnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah.

Data yang disajikan meliputi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sumber utama data berasal dari laporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan laporan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2014 - 2015.

Diucapkan terima kasih, kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini dapat diselesaikan tepat waktu serta penghargaan secara khusus kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah membantu dalam penyediaan data.

Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi para pengguna yang membutuhkannya.

Palu, November 2016

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



FAIZAD ANWAR

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Lampiran	vi
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup dan Sumber Data	2
1.3. Konsep dan Definisi	3
II. ULASAN RINGKAS	
2.1. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	4
2.2. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	5
2.3. Realisasi Pendapatan/Belanja Daerah Kabupaten/Kota	6
2.4. Realisasi Pendapatan/Belanja Daerah Kabupaten/Kota	14
Lampiran.....	

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2015	5
Grafik 2	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2015	6
Grafik 3	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2015.....	7
Grafik 4.1	Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai dan Morowali Tahun 2015.....	8
Grafik 4.2	Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Donggala dan Toli-toli Tahun 2015	9
Grafik 4.3	Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Parigi Moutong dan Tojo Una-una, Tahun 2015.....	11
Grafik 4.4	Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Banggai Laut, Morowali Utara dan Kota Palu, Tahun 2015.....	13
Grafik 5.	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Tahun 2015	14
Grafik 6.1	Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai dan Morowali Tahun 2015.....	15
Grafik 6.2	Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Donggala dan Toli-toli Tahun 2015	16
Grafik 6.3	Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Parigi Moutong dan Tojo Una-una, Tahun 2015.....	17
Grafik 6.4	Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Banggai Laut, Morowali Utara dan Kota Palu, Tahun 2015.....	19

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2015 22
Tabel 2	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2015 23
Tabel 3	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 – 2015 24
Tabel 4	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 – 2015 25
Tabel 5	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014 – 2015 26
Tabel 6	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014 – 2015 27
Tabel 7	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2014 – 2015 28
Tabel 8	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2014 – 2015 29
Tabel 9	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2014 – 2015 30
Tabel 10	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2014 – 2015..... 31
Tabel 11	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2014 – 2015 32
Tabel 12	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2014 – 2015 33
Tabel 13	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-toli Tahun 2014 – 2015 34

Tabel 14	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-toli Tahun 2014 – 2015	35
Tabel 15	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2014 – 2015	36
Tabel 16	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2014 – 2015	37
Tabel 17	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 – 2015	38
Tabel 18	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 – 2015	39
Tabel 19	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2014 – 2015	40
Tabel 20	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2014 – 2015	41
Tabel 21	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 – 2015	42
Tabel 22	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 – 2015	43
Tabel 23	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014 – 2015	44
Tabel 24	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014 – 2015	45
Tabel 25	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 – 2015	46
Tabel 26	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 – 2015	47
Tabel 27	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2014 – 2015	48

Tabel 28	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Palu	
	Tahun 2014 – 2015	49

<http://sulteng.bps.go.id>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perimbangan keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, merupakan subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi dari pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah. Penyelenggaraan kegiatan oleh pemerintah daerah adalah dalam rangka tugas pembantuan yang didanai oleh APBN. Sedangkan pelaksanaan desentralisasinya didanai APBD. Perimbangan keuangan dimaksudkan untuk menjaga dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya. Dengan segala kewenangan dan sumber keuangan yang memadai, diharapkan pemerintah daerah lebih leluasa dalam merencanakan pembangunan dan efektif dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah terus diupayakan untuk ditingkatkan sehingga selaras dengan program pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Pembangunan perlu dilaksanakan secara terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dapat terwujud keharmonisan dan keseimbangan pembangunan nasional menuju cita – cita bersama yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut di antaranya adalah dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah dengan asas transparansi dan akuntabel melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dikelola dengan efektif dan efisien.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara bahwa perhitungan perencanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana telah ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD, yaitu dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dalam rangka keperluan analisis untuk pengambilan keputusan dan memenuhi kelengkapan informasi tentang Keuangan Negara, hasil kompilasi data statistik tentang keuangan daerah sangat bermanfaat, antara lain:

1. Sebagai bahan penyusunan neraca ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional seperti pendapatan regional/nasional, tabel input-output, dan neraca arus dana.
2. Memberi gambaran tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Untuk mengetahui potensi dan sumber dana dari masing-masing daerah.
4. Sebagai informasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah di bawahnya.

1.2 Ruang Lingkup dan Sumber Data

Data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan untuk Daerah Kabupaten/kota diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kabupaten/Kota (PPKAD).

Dalam penyajiannya rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan hasil kompilasi daftar K-1 dan K-2 yang telah disiapkan oleh BPS RI. Periode pencatatan mengacu pada tahun fiskal/anggaran, yakni dari bulan Januari sampai dengan Desember.

1.3 Konsep dan Definisi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Pemerintah Daerah dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagian Dana Perimbangan berupa bagi hasil pajak/ bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri atas belanja tak langsung dan belanja langsung. Belanja tak langsung berasal dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung berasal dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Belanja Tak Langsung

Belanja tak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program pemerintah.

Belanja Langsung

Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan yang terkait langsung dengan pelaksanaan program pemerintah.

II. ULASAN RINGKAS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber keuangan Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan sebagai regulator dalam pelayanan masyarakat. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam memajukan suatu daerah sangat tergantung kebijakan pengalokasian dana APBD untuk pelaksanaan program-program pembangunan. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, APBD dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen Pendapatan Daerah sebagai tolok ukur kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki. Selanjutnya bagian Dana Perimbangan sebagai komponen terbesar Pendapatan Daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan belanja daerahnya. Belanja Daerah terdiri dari bagian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Dari komposisi Belanja Daerah, dapat dilihat program prioritas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

2.1. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

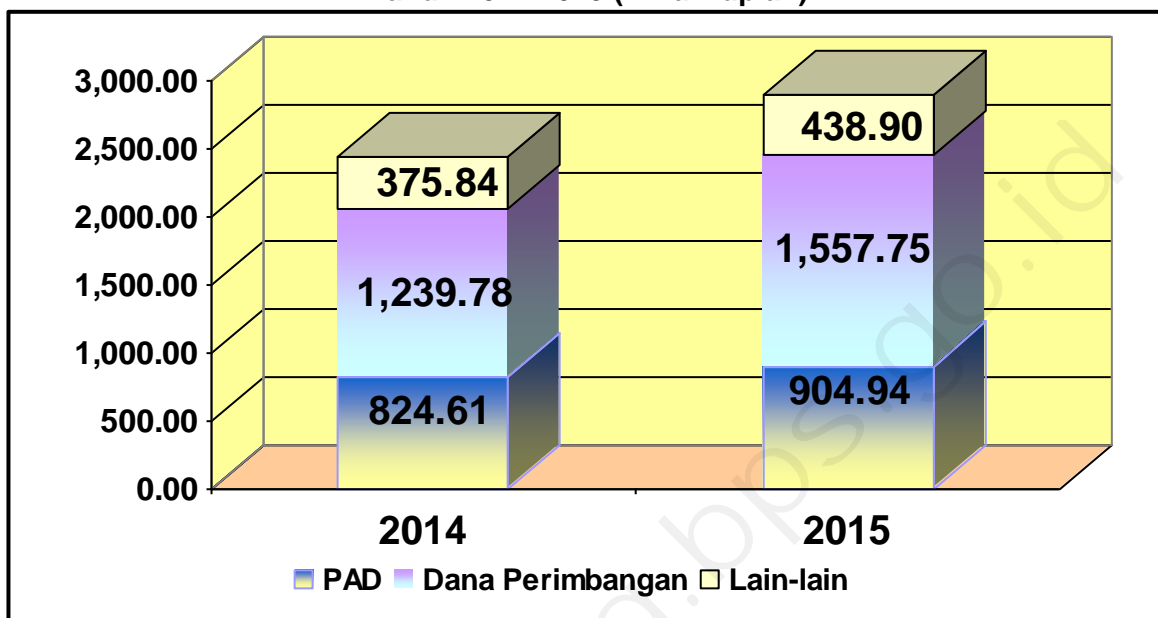
Selama tahun 2015, realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tercatat sejumlah 2.901,583 miliar rupiah atau meningkat 18,90 persen dari tahun 2014. Pesatnya pertumbuhan tersebut disebabkan oleh tingginya peningkatan realisasi bagian Dana Perimbangan sebesar 25,65 persen. Pada periode yang sama Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh sebesar 9,74 persen terutama berasal dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yakni sebesar 112,70 persen diikuti oleh Retribusi Daerah dengan peningkatan sebesar 43,37 persen.

Kontribusi terbesar pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan yakni sebesar 53,69 persen dari keseluruhan Anggaran Pendapatan Daerah,

diikuti oleh pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya yang sah masing-masing sebesar 31,19 persen dan 15,13 persen.

Grafik 1.

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2014-2015 (miliar rupiah)**



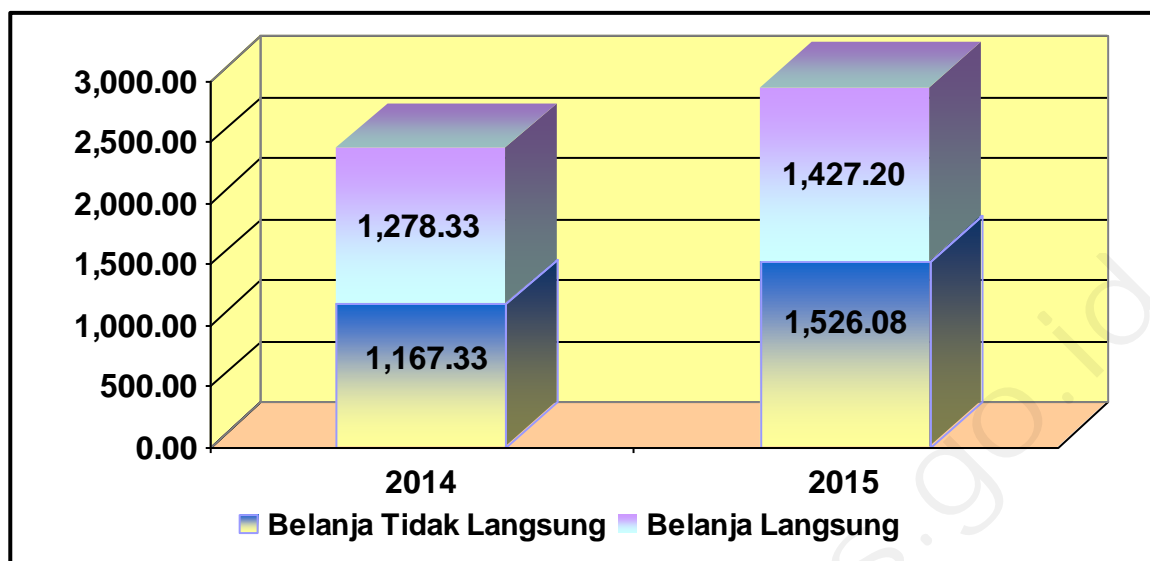
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

2.2. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pada tahun 2015, total realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencapai sejumlah 2.953,28 miliar rupiah, meningkat 20,76 persen dibandingkan realisasi belanja tahun sebelumnya yang mencapai 2.445,66 miliar rupiah. Sebesar 51,67 persen realisasi belanja tersebut terserap pada Belanja Tidak Langsung atau setara dengan 1.526,08 miliar rupiah, sedangkan sebesar 48,33 persen sisanya terserap pada Belanja Langsung yaitu sejumlah 1.427,20 miliar rupiah. Porsi Belanja Pegawai keseluruhan baik yang berasal dari Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah mencapai angka yang cukup besar yakni 22,86 persen atau sejumlah 675,19 miliar rupiah, sedangkan alokasi untuk Belanja Modal dari total nilai Belanja Daerah hanya sebesar 14,98 persen atau sejumlah 442,52 milyar rupiah mengalami peningkatan dari sebelumnya yang hanya 9,37 persen atau sebesar 276,831 miliar rupiah.

Grafik 2.

Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2013-2014 (miliar rupiah)



Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

2.3. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota

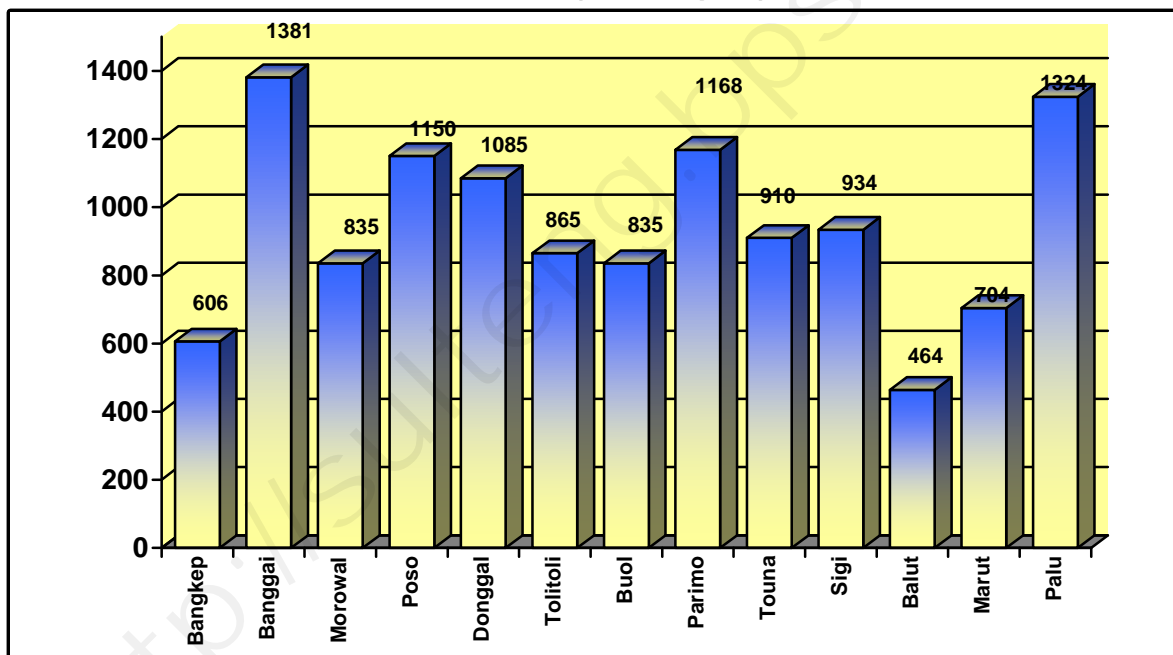
Secara umum realisasi Pendapatan Daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah tahun anggaran 2015 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi Pendapatan Daerah terjadi di seluruh kabupaten/kota. Peningkatan tertinggi terjadi di Kabupaten Banggai Laut yang mencapai 121,48 persen diikuti Kabupaten Morowali yakni sebesar 76,39 persen selanjutnya Kabupaten Morowali Utara sebesar 36,19 persen, sedangkan peningkatan terendah terjadi di Kota Palu yang meningkat hanya sebesar 11,82 persen. Peningkatan Pendapatan daerah yang terjadi di Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara lebih disebabkan oleh terjadinya pemecahan Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi Banggai Kepulauan dan Banggai Laut serta Kabupaten Morowali menjadi Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara yang berakibat pada dipecahnya Pendapatan daerah pada kedua Kabupaten tersebut.

Pada tahun 2015, Kabupaten Morowali Utara menjadi satu-satunya kabupaten yang mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan penurunan sebesar 6,63 persen. Kabupaten yang mengalami peningkatan PAD

tertinggi adalah Kabupaten Morowali sebesar 193,75, disusul Kabupaten Banggai Laut yakni sebesar 110,37 persen.

Proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah merupakan salah satu indikasi kemandirian suatu daerah otonomi. Apabila dirinci dari proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah, maka pada tahun 2015 proporsi tertinggi dicapai oleh Kota Palu dengan besaran 19,18 persen, diikuti oleh Kabupaten Morowali di urutan kedua sebesar 8,14 persen, dan Kabupaten Banggai di urutan ketiga sebesar 8,14 persen, dan dua terendah adalah Kabupaten Sigi dan Kabupaten Banggai Laut masing-masing sebesar 2,73 persen dan 2,65 persen.

Grafik 3.
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2015 (miliar rupiah)

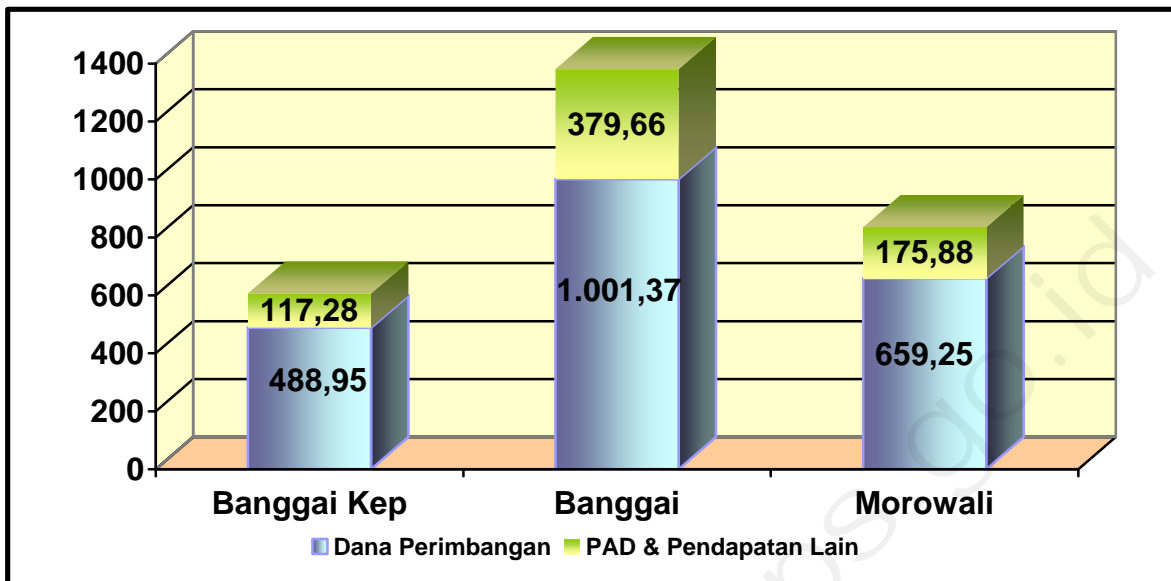


Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kab/Kota

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2015 mencapai 606,23 miliar rupiah, secara implisit angka ini meningkat sebesar 24,58 persen dibanding dengan tahun 2014. Bila diperhatikan dari struktur pembentuk Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan andil terbesar berasal dari Dana Perimbangan terhadap total pendapatan sekitar 80,65 persen, bagian lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 15,92 persen sedangkan Pendapatan Asli Daerah hanya sekitar 3,43 persen.

Grafik 4.1.

**Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan,
Banggai dan Morowali, Tahun 2015 (miliar rupiah)**



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

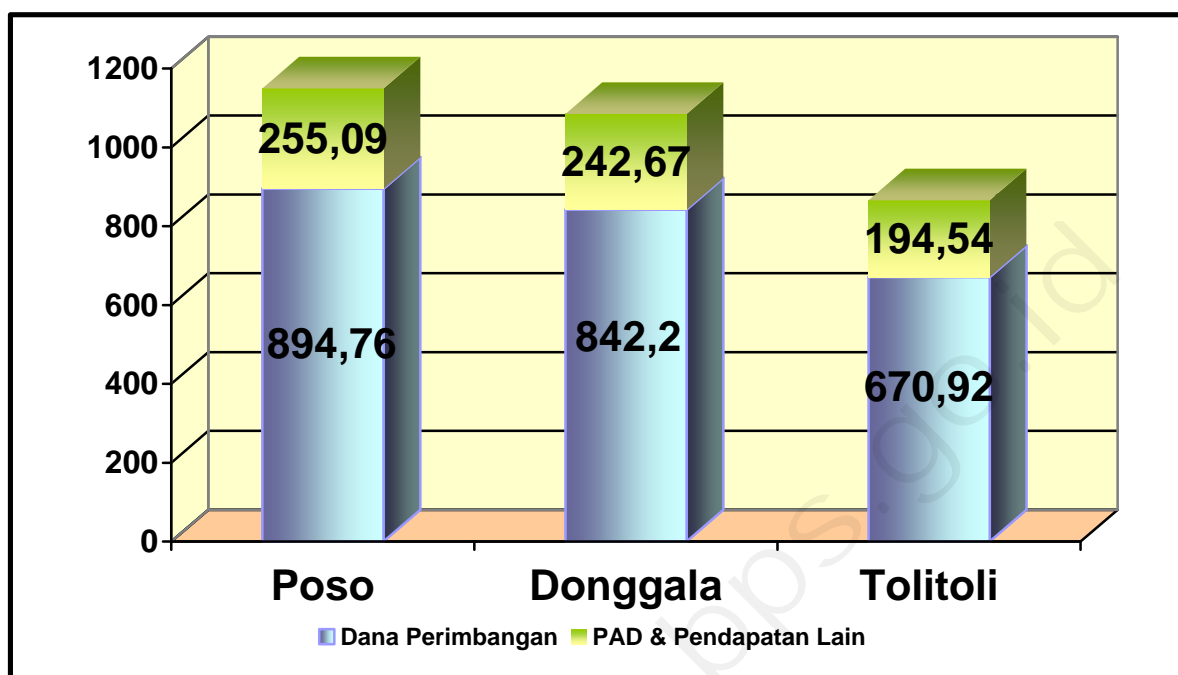
Kabupaten Banggai tahun 2015 mencatat peningkatan realisasi Pendapatan Daerah sebesar 15,19 persen dari 1.198,95 miliar rupiah tahun 2014 menjadi 1.381,03 miliar rupiah tahun 2015. Peningkatan tertinggi disumbangkan oleh lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 54,07 persen, diikuti Pendapatan Asli Daerah sebesar 18,75 persen, selanjutnya Dana Perimbangan sebesar 7,58 persen.

Struktur Pendapatan Daerah di Kabupaten Banggai pada tahun anggaran 2015 masih didominasi oleh andil dari bagian Dana Perimbangan sebesar 72,51 persen, diikuti lain - lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 19,35 persen, selanjutnya Pendapatan Asli Daerah sebesar 8,14 persen.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Morowali pada tahun anggaran 2015 terbentuk dari bagian Dana Perimbangan yang mencapai sebesar 78,94 persen, selanjutnya bagian lain – lain Pendapatan Daerah yang sah dan Pendapatan Asli Daerah masing-masing menyumbangkan andil sebesar 12,15 persen dan 8,19 persen.

Grafik 4.2.

Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Donggala dan Tolitoli
Tahun 2015 (miliar rupiah)



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kabupaten Poso pada tahun 2015 mencatat peningkatan realisasi Pendapatan Daerah sebesar 17,77 persen dari 976,31 miliar rupiah menjadi 1.149,84 miliar rupiah. Bagian Dana Perimbangan memberikan andil sebesar 77,82 persen dari Pendapatan Daerah yang mengalami peningkatan sebesar 19,08 persen dari tahun sebelumnya yakni dari 751,41 miliar rupiah tahun 2014 menjadi 894,76 miliar rupiah tahun 2015. Tahun 2015 realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso sebesar 5,13 persen dari 66,75 miliar rupiah tahun 2014 menjadi 70,17 miliar rupiah pada tahun 2015, peningkatan pada sub bagian lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meningkat sebesar 16,93 persen. Fenomena tersebut tidak banyak merubah struktur andil PAD terhadap Pendapatan Daerah menjadi sebesar 6,10 persen, sedangkan bagian lain – lain Pendapatan Daerah yang sah mempunyai andil sebesar 16,08 persen terhadap total Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala mengalami peningkatan sebesar 27,07 persen dari realisasi 853,75 miliar rupiah pada tahun 2014 menjadi sebesar 1.084,87 miliar rupiah pada tahun 2015. Peningkatan jumlah anggaran tersebut

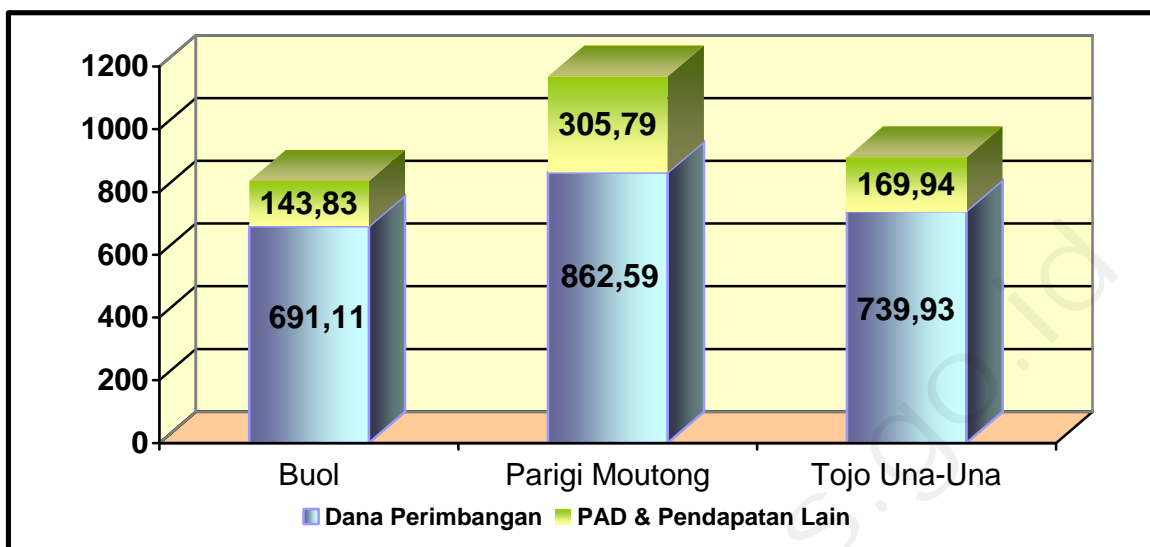
disebabkan oleh meningkatnya bagian lain – lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 35,82 persen, sedangkan PAD hanya meningkat sebesar 3,79 persen yakni dari 57,74 M pada tahun 2014 menjadi 59,93 M pada tahun 2015.

Struktur Pendapatan Daerah di Kabupaten Donggala pada tahun 2015 masih didominasi oleh andil dari bagian Dana Perimbangan sebesar 77,63 persen, diikuti lain - lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 16,84 persen, selanjutnya Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,52 persen.

Peningkatan realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2015 juga terjadi pada Kabupaten Toli-Toli sebesar 16,09 persen. Tahun anggaran 2015 total realisasi pendapatan Kabupaten Toli-Toli mencapai 865,48 miliar rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 745,52 miliar rupiah. Sub Bagian lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mengalami peningkatan yang sangat pesat yakni sebesar 156,02 persen, diikuti peningkatan Sub Bagian Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah masing-masing sebesar 106,83 persen dan 19,06 persen mengakibatkan pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 32,93 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada Bagian Dana Perimbangan terjadi peningkatan sebesar 7,36 persen atau dari 636,13 miliar rupiah pada tahun 2014 menjadi 670,92 miliar rupiah pada tahun 2015. Kontribusi terbesar penyumbang Pendapatan Daerah Kabupaten Tolitoli tahun 2015 adalah bagian Dana Perimbangan yaitu sebesar 77,52 persen, diikuti oleh bagian lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 15,13 persen dan bagian Pendapatan Asli Daerah sebesar 7,35 persen.

Grafik 4.3.

Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Parigi Moutong dan Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2015 (miliar rupiah)



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Total Pendapatan Daerah Kabupaten Buol tahun anggaran 2015 mencapai 834,94 miliar rupiah, meningkat 33,24 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 626,65 miliar rupiah. Peningkatan Pendapatan Daerah disumbangkan oleh peningkatan dari bagian lain-lain Pendapatan yang sah sebesar 60,77 persen, sementara bagian Dana Perimbangan meningkat sebesar 30,23 persen dan Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 30,97 persen.

Dilihat dari strukturnya maka bagian terbesar Pendapatan Daerah disumbangkan oleh Dana Perimbangan sebesar 82,77 persen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah masing-masing hanya menyumbangkan sebesar 5,51 persen dan 11,72 persen.

Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2015 mencatat realisasi pendapatan sebesar 1.168 miliar rupiah atau meningkat 20,01 persen dibandingkan tahun 2014 yang hanya tercatat sebesar 973,57 miliar rupiah. Peningkatan tersebut didorong oleh bagian lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 73,55 persen diikuti bagian Dana Perimbangan yang meningkat 12,66 persen sedangkan PAD hanya mengalami peningkatan sebesar 1,67 persen.

Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Moutong masih didominasi oleh Bagian Dana Perimbangan dengan andil sebesar 73,83 persen, selanjutnya andil Bagian PAD dan lain – lain Pendapatan Daerah yang sah terhadap total Pendapatan Daerah berturut-turut sebesar 5,47 persen dan 13,21 persen hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan yang signifikan dibanding dengan struktur pendapatan tahun sebelumnya.

Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2015 memperoleh Pendapatan Daerah sebesar 909,87 miliar rupiah meningkat sebesar 27,48 persen dibanding tahun 2014 yang sebesar 713,75 miliar rupiah. Peningkatan realisasi Pendapatan Daerah disebabkan peningkatan realisasi bagian Pendapatan Asli Daerah sebesar 13,18 persen, bagian Dana Perimbangan sebesar meningkat sebesar 25,57 persen dan bagian lain - lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 49,25 persen. Struktur Pendapatan Daerah di Kabupaten Tojo Una-una masih sangat didominasi Dana Perimbangan sebesar 81,32 persen, sedangkan bagian Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 5,47persen, dan lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 13,21 persen. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan Kabupaten Tojo Una-una masih sangat tergantung bantuan pusat.

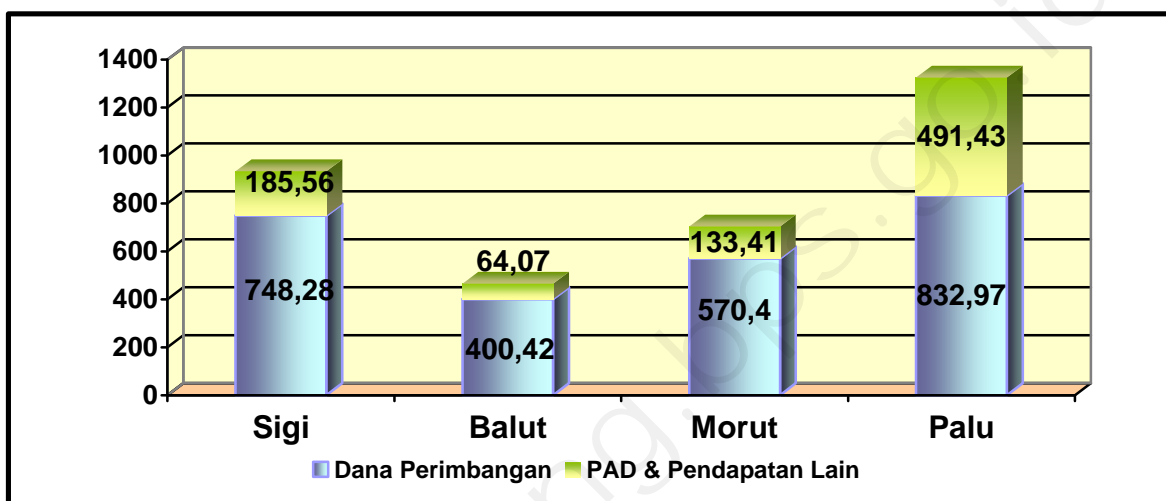
Kabupaten Sigi pada tahun anggaran 2015 merealisasikan Pendapatan Daerah sebesar 933,84 miliar rupiah, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 22,59 persen yang berasal dari peningkatan seluruh komponen Pendapatan Daerah, yaitu bagian Pendapatan Asli Daerah sebesar 8,13 persen, bagian Dana Perimbangan sebesar 15,06 persen sedangkan bagian lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan sebesar 82,30 persen. Dilihat dari struktur pembentuknya, bagian Dana Perimbangan mendominasi dengan andil sebesar 80,13 persen, diikuti oleh bagian lain - lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 17,14 persen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah hanya memberi kontribusi sebesar 2,73 persen.

Sebagai kabupaten yang baru terbentuk Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara memiliki Pendapatan Daerah yang cukup kecil. Kabupaten Banggai Laut memiliki Pendapatan Daerah sebesar 464,49 miliar rupiah dimana 86,21 persen diantaranya berasal dari Dana Perimbangan sedangkan lain - lain Pendapatan yang Sah dan Pendapatan Asli Daerah masing-

masing sebesar 11,15 persen dan 2,65 persen. Keadaan yang hampir sama terjadi di Kabupaten Morowali Utara dimana dari 703,81 miliar rupiah Pendapatan daerah sebesar 81,04 persen berasal dari Dana Perimbangan sisanya 13,56 persen adalah lain-lain Pendapatan yang sah dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,40 persen.

Grafik 4.4.

Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Banggai Laut, Morowali Utara, dan Kota Palu Tahun 2015 (miliar rupiah)



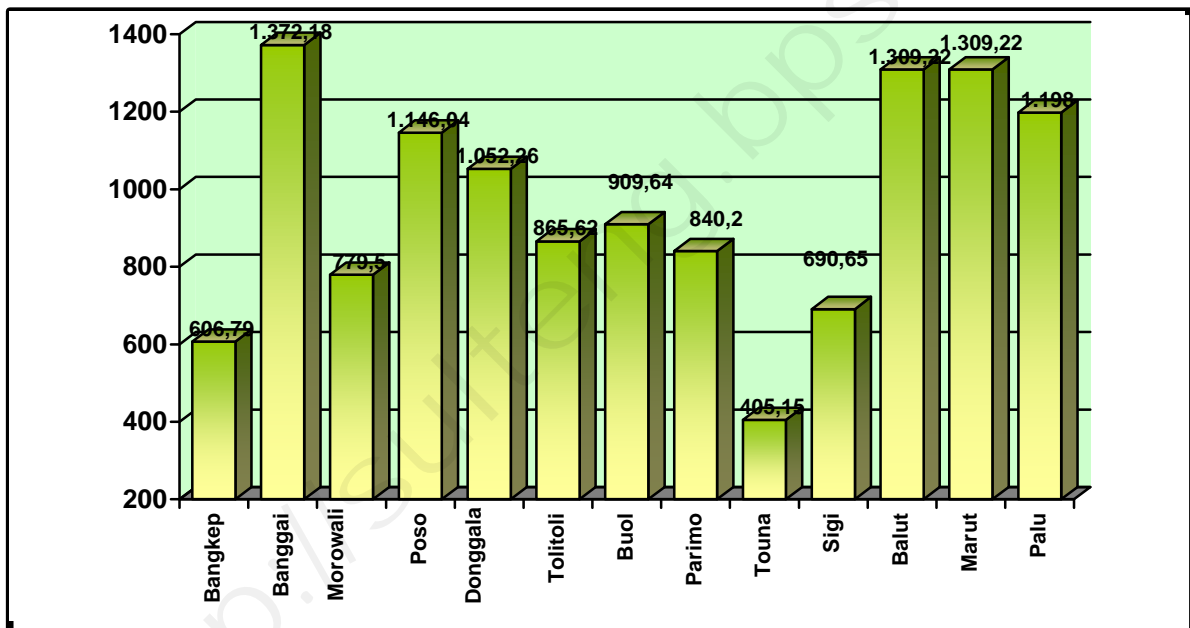
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota

Total Pendapatan Daerah Kota Palu tahun anggaran 2015 mencapai 1.324,40 miliar rupiah atau mengalami peningkatan 11,82 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1.184,38 miliar rupiah. Seluruh komponen Pendapatan Daerah menunjukkan pertumbuhan positif, Pendapatan Asli Daerah mencapai peningkatan sebesar 7,20 persen, Dana Perimbangan meningkat sebesar 16,71 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meningkat signifikan sebesar 1,59 persen. Pendapatan Asli Daerah Kota Palu sebagai tolak ukur kinerja daerah memiliki andil hampir mencapai sebesar 20,00 persen terhadap total Pendapatan Daerah, dan merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki andil PAD diatas 10 persen. Selanjutnya bagian Dana Perimbangan dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan andil masing-masing sebesar 62,89 persen dan 17,93 persen.

2.4. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun anggaran 2015 hampir mencapai 606,79 miliar rupiah dengan komposisi belanja daerah terdiri dari 50,80 persen Belanja Tidak Langsung atau setara dengan 308,25 miliar rupiah dan 49,20 persen Belanja Langsung atau setara dengan 298,55 miliar rupiah. Komponen Belanja Langsung didominasi oleh Belanja Modal yang mencapai 57,43 persen, kemudian diikuti oleh Belanja Barang dan Jasa sebesar 32,81 persen dan 9,76 persen sisanya dipergunakan untuk porsi Belanja Pegawai.

Gambar. 5
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2015 (miliar rupiah)

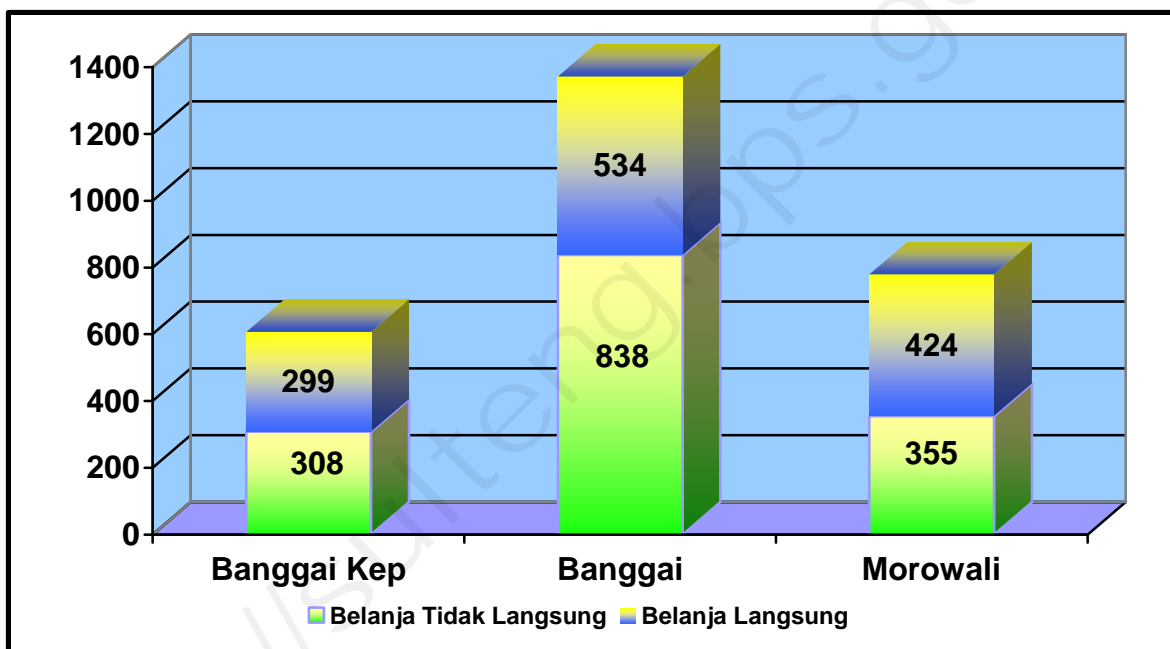


Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kab/Kota

Kabupaten Banggai tahun 2015 berhasil merealisasikan Belanja Daerah sebesar 1.372,18 miliar rupiah, naik sebesar 16,62 persen dibandingkan periode sebelumnya. Sebesar 61,05 persen direalisasikan untuk Belanja Tidak Langsung, sedangkan 38,95 persen untuk Belanja Langsung. Dari sekitar 534,43 miliar rupiah keseluruhan Belanja Langsung sebesar 51,85 persen diantaranya digunakan untuk Belanja Barang sedangkan Belanja Pegawai dan Belanja Modal mendapat porsi masing-masing sebesar 5,17 persen dan 42,98 persen.

Pada tahun 2015 Belanja Daerah Kabupaten Morowali yang terealisasi sebesar 779,50 miliar rupiah, meningkat sebesar 64,40 persen dari tahun sebelumnya. Sebesar 45,59 persen dari total belanja dipergunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan 54,41 persen untuk Belanja Langsung. Komposisi Belanja Langsung sebesar 424,119 miliar rupiah dialokasikan sebesar 57,16 persen untuk Belanja Modal, sebesar 35,06 persen untuk Belanja Barang dan 7,79 persen untuk Belanja Pegawai.

Gambar. 6.1.
Struktur Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai dan Morowali
Tahun 2015 (miliar rupiah)



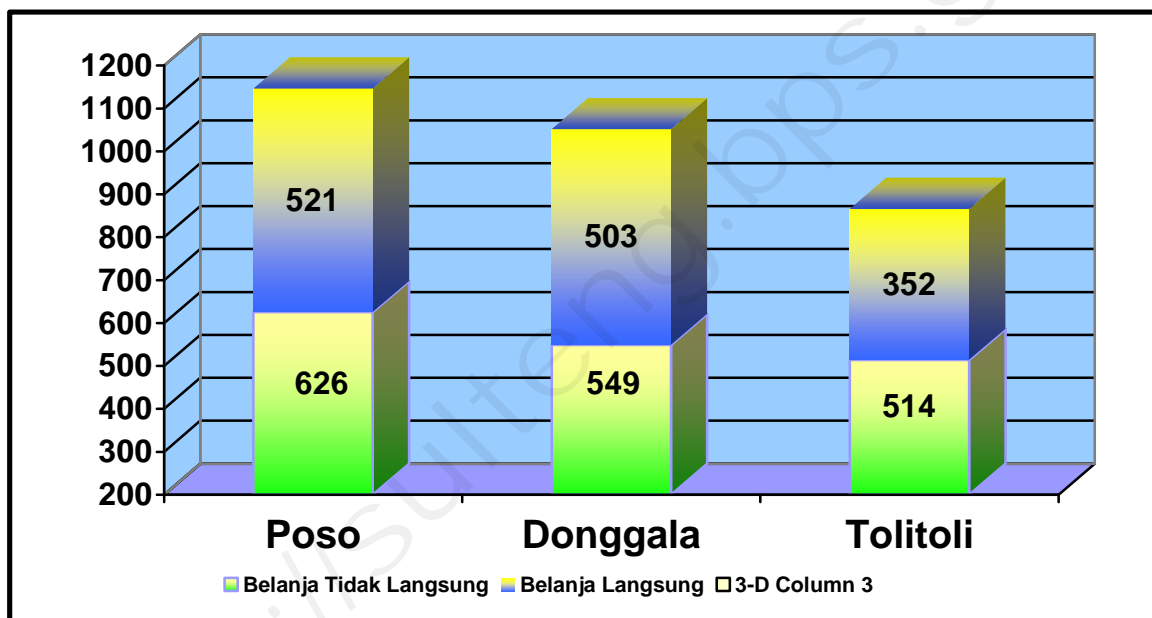
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kabupaten Poso tahun 2015 menghabiskan anggaran sebesar 1.146,03 miliar rupiah untuk Belanja Daerah atau mengalami peningkatan sebesar 19,33 persen dibandingkan belanja tahun sebelumnya. Porsi terbesar dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung yaitu sebesar 45,59 persen, sedangkan Belanja Langsung mendapat porsi sebesar 54,41 persen. Belanja Langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program pemerintah sebesar 520,53 miliar rupiah digunakan dengan proporsi untuk Belanja Pegawai sebesar 5,85 persen, Belanja Barang sebesar 60,24 persen dan Belanja Modal sebesar 33,90 persen.

Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2015 sebesar 1.052,26 miliar rupiah, meningkat 25,82 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 836,30 miliar rupiah. Pada Tahun 2015 ini porsi belanja sebesar 52,17 persen dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung, sedangkan Belanja Langsung hanya mendapat alokasi belanja sebesar 47,83 persen. Total anggaran Belanja Langsung sebesar 503,33 miliar rupiah 8,60 persen digunakan untuk Belanja Pegawai, 39,70 persen untuk Belanja Barang dan 51,70 persen Belanja Modal.

Gambar. 6.2.

Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Donggala dan Tolitoli Tahun 2015 (miliar rupiah)



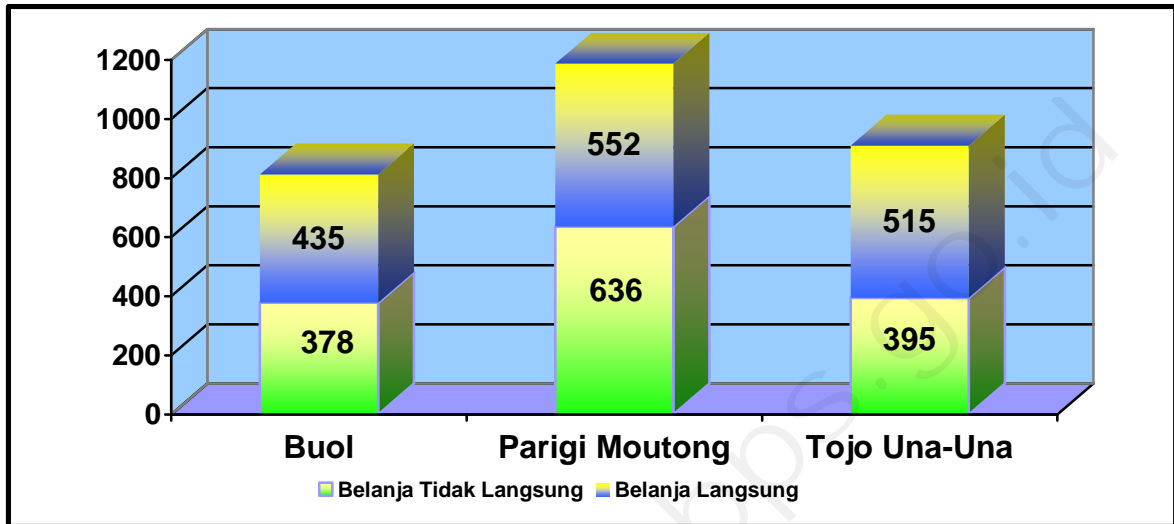
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Total Belanja Daerah Kabupaten Toli-toli Tahun 2015 tercatat sebesar 865,62 miliar rupiah mengalami peningkatan sebesar 19,46 persen dari realisasi belanja tahun sebelumnya. Dari sejumlah alokasi belanja tersebut Kabupaten Toli-toli mengalokasikan dana untuk Belanja Langsung sebesar 59,37 persen atau senilai 513,92 miliar rupiah, sedangkan 40,63 persen sisanya digunakan untuk Belanja Tidak Langsung. Sebesar 40,88 persen dari total 351,70 miliar rupiah Belanja Langsung direalisasikan untuk Belanja Modal, sedangkan Belanja Pegawai dan Belanja Barang masing-masing mendapatkan bagian sebesar 11,15

persen dan 47,97 persen.

Gambar. 6.3.

Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Parigi Moutong dan Tojo Una-Una Tahun 2015 (miliar rupiah)



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Pada tahun 2014 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol mencapai 599,76 miliar rupiah, meningkat menjadi sebesar 812,06 miliar rupiah dengan peningkatan sebesar 35,40 persen pada tahun 2015. Realisasi belanja tersebut dimanfaatkan untuk porsi Belanja Langsung sebesar 53,51 persen dan Belanja Tidak Langsung sebesar 46,49 persen. Sebesar 434,51 miliar rupiah total Belanja Langsung digunakan untuk Belanja Modal sebesar 58,89 persen, sedangkan sebesar 31,07 persen untuk Belanja Barang dan 10,04 persen untuk Belanja Pegawai.

Pada Tahun 2015 pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong merealisasikan total belanja daerah sebesar 1.187,52 miliar rupiah, meningkat 25,21 persen dari tahun 2014 sebesar 948,41 miliar rupiah. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar 635,73 miliar rupiah atau sebesar 53,53 persen, sedangkan Belanja Langsung sebesar 46,47 persen atau sebesar 551,79 miliar rupiah. Alokasi dari total Belanja Langsung sebesar 41,77 persen atau 230,48 miliar rupiah digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa, sedangkan Belanja Pegawai dan Belanja Modal masing-masing mendapat porsi sebesar 11,35 persen

dan 46,88 persen.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015 mencapai 909,64 miliar rupiah, meningkat 30,46 persen dari tahun sebelumnya sebesar 697,25 miliar rupiah. Bagian Belanja Tidak Langsung menunjukkan peningkatan realisasi dari tahun 2014 sebesar 40,52 persen, sedangkan bagian Belanja Langsung mengalami peningkatan sebesar 23,66 persen. Sebesar 56,56 persen total Belanja Daerah dimanfaatkan untuk Belanja Langsung dengan distribusi Belanja Pegawai sebesar 9,70 persen, Belanja Barang sebesar 34,75 persen dan Belanja Modal sebesar 55,45 persen.

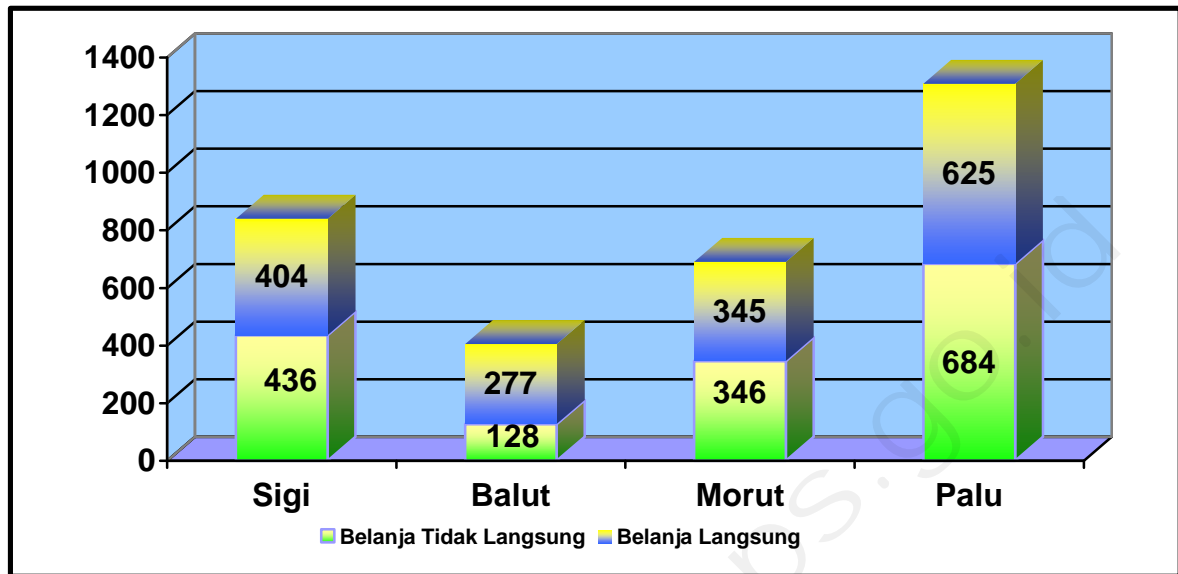
Kabupaten Sigi Tahun 2015 berhasil merealisasikan anggaran Belanja Daerah sejumlah 840,20 miliar rupiah, atau meningkat sebesar 14,79 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Belanja Tidak Langsung tercatat sejumlah 436,04 miliar rupiah atau sebesar 51,90 persen dan Belanja Langsung sejumlah 404,17 miliar rupiah atau sebesar 48,10 persen. Total Belanja Langsung dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal masing-masing sebesar 10,12 persen, 39,83 persen dan 50,05 persen.

Anggaran belanja daerah Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2015 tercatat sebesar 405,15 miliar rupiah sebesar 31,66 persen dari total belanja tersebut digunakan untuk Belanja Tidak Langsung sedangkan Belanja Langsung mendapat alokasi sebesar 68,34 persen. Dari 276,87 miliar rupiah Belanja Langsung dialokasikan sebesar 7,40 persen untuk Belanja Pegawai, 28,87 persen untuk belanja Barang dan 63,73 persen untuk Belanja Modal.

Kabupaten Morowali Utara merealisasikan anggaran Belanja sebesar 690,65 miliar rupiah pada tahun 2015. Dari total 345,61 miliar Belanja Tidak Langsung atau 50,04 persen sedangkan Belanja Langsung sebesar 345,03 miliar rupiah atau 49,96 persen. Adapun alokasi untuk Belanja Langsung adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal masing-masing sebesar 7,47 persen, 31,48 persen dan 61,05 persen.

Gambar. 6.4.

Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Banggai Laut, Morowali Utara dan Kota Palu Tahun 2015 (miliar rupiah)



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota

Kota Palu pada Tahun 2015 merealisasikan Belanja Daerah sejumlah 1.309,22 miliar rupiah, jumlah ini mengalami peningkatan 9,27 persen dari tahun 2014 yang hanya sebesar 1.198,13 miliar rupiah. Peningkatan realisasi belanja tersebut dipengaruhi oleh peningkatan Belanja Tidak Langsung sebesar 14,75 persen, sementara Belanja Langsung mengalami peningkatan sebesar 3,84 persen dari tahun sebelumnya. Porsi Belanja Langsung Tahun 2015 mencapai 625,11 miliar rupiah atau 47,75 persen dari total Belanja Daerah, sedangkan 52,25 persen sisanya direalisasikan untuk Belanja Tidak Langsung. Belanja Barang mendapat porsi terbesar dari Belanja Langsung mencapai 319,96 miliar rupiah atau 51,19 persen. Sementara itu Belanja Pegawai dan Belanja Modal masing-masing terealisasi sebesar 60,47 miliar rupiah (9,67 persen) dan 244,66 miliar rupiah (39,14 persen) dari total Belanja Langsung.

LAMPIRAN

<http://sulteng.bps.go.id>

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH	2 440 226 816	2 901 587 583
1. Pendapatan Asli Daerah	824 611 352	904 937 125
1.1. Pajak Daerah	663 633 353	738 993 197
1.2. Retribusi Daerah	4 326 902	6 203 474
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9 548 970	20 311 030
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	147 102 127	139 429 424
2. Dana Perimbangan	1 239 776 947	1 557 754 565
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	62 083 121	53 911 018
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	25 866 332	31 254 392
2.3. Dana Alokasi Umum	1 087 885 014	1 221 602 865
2.4. Dana Alokasi Khusus	63 942 480	250 986 290
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	375 838 517	438 895 893
B. PENDAPATAN DAERAH	141 264 204	129 129 772
JUMLAH	2 581 491 020	3 030 717 355

Tabel 2. Realisasi Pengeluaran Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	2 445 661 248	2 953 280 683
1. Belanja Tidak Langsung	1 167 333 262	1 526 076 325
1.1. Belanja Pegawai	376 699 998	531 258 852
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	363 244 679	578 491 677
1.5. Belanja Bantuan Sosial	4 124 500	2 025 000
1.6. Belanja Bagi Hasil	305 162 966	307 534 979
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	117 267 144	106 638 838
1.8. Belanja Tidak Terduga	833 976	126 979
2. Belanja Langsung	1 278 327 986	1 427 204 358
2.1. Belanja Pegawai	148 177 160	143 934 107
2.2. Belanja Barang dan Jasa	853 319 017	840 745 925
2.3. Belanja Modal	276 831 808	442 524 325
B. PEMBIAYAAN DAERAH	135 829 772	77 436 672
JUMLAH	2 581 491 020	3 030 717 355

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH	486 619 674	606 230 529
1. Pendapatan Asli Daerah	16 015 578	20 792 119
1.1. Pajak Daerah	3 983 108	3 781 630
1.2. Retribusi Daerah	1 005 385	1 666 422
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	222 525	481 297
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10 804 560	14 862 770
2. Dana Perimbangan	423 512 350	488 953 847
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	10 210 882	15 270 657
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3 571 948	-
2.3. Dana Alokasi Umum	347 051 160	410 850 710
2.4. Dana Alokasi Khusus	62 678 360	62 832 480
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	47 091 747	96 484 562
B. PENDAPATAN DAERAH	72 838 907	106 416 087
JUMLAH	559 458 582	712 646 615

Tabel 4. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	450 428 569	606 794 119
1. Belanja Tidak Langsung	217 064 836	308 248 370
1.1. Belanja Pegawai	194 820 770	212 826 216
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	6 848 829	8 205 000
1.5. Belanja Bantuan Sosial	1 434 422	4 127 750
1.6. Belanja Bagi Hasil	329 281	291 821
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	13 375 735	82 243 783
1.8. Belanja Tidak Terduga	255 800	553 800
2. Belanja Langsung	233 363 733	298 545 749
2.1. Belanja Pegawai	21 766 540	29 144 864
2.2. Belanja Barang dan Jasa	92 009 587	97 941 607
2.3. Belanja Modal	119 587 606	171 459 278
B. PEMBIAYAAN DAERAH	109 030 013	105 852 496
JUMLAH	559 458 582	712 646 615

Tabel 5. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 198 950 867	1 381 027 259
1. Pendapatan Asli Daerah	94 645 188	112 387 822
1.1. Pajak Daerah	28 953 734	30 124 922
1.2. Retribusi Daerah	49 469 785	50 754 084
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 198 757	2 420 273
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15 022 912	29 088 543
2. Dana Perimbangan	930 837 145	1 001 369 542
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	35 817 747	55 380 182
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	18 458 389	-
2.3. Dana Alokasi Umum	794 840 029	835 942 815
2.4. Dana Alokasi Khusus	81 720 980	110 046 545
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	173 468 534	267 269 895
B. PENDAPATAN DAERAH	79 446 515	99 137 246
JUMLAH	1 278 397 382	1 480 164 505

Tabel 6. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	1 176 601 136	1 372 177 880
1. Belanja Tidak Langsung	643 877 597	837 743 244
1.1. Belanja Pegawai	586 467 092	619 530 097
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	316 294	319 584
1.4. Belanja Hibah	7 043 137	40 332 549
1.5. Belanja Bantuan Sosial	8 962 400	-
1.6. Belanja Bagi Hasil	4 231 548	8 079 244
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	36 710 626	169 365 827
1.8. Belanja Tidak Terduga	146 500	115 943
2. Belanja Langsung	532 723 539	534 434 636
2.1. Belanja Pegawai	23 025 800	27 621 711
2.2. Belanja Barang dan Jasa	250 069 263	277 113 260
2.3. Belanja Modal	259 628 476	229 699 665
B. PEMBIAYAAN DAERAH	101 796 246	107 986 625
JUMLAH	1 278 397 382	1 480 164 505

Tabel 7. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH	473 467 944	835 127 978
1. Pendapatan Asli Daerah / <i>Original</i>	25 341 128	74 439 927
1.1. Pajak Daerah	5 478 277	9 253 914
1.2. Retribusi Daerah	11 198 336	23 904 259
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	806 417	1 784 645
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7 858 097	39 497 109
2. Dana Perimbangan	402 072 482	659 252 374
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	18 248 936	62 747 060
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	30 267 270	-
2.3. Dana Alokasi Umum	286 764 166	432 831 984
2.4. Dana Alokasi Khusus	66 792 110	163 673 330
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	46 054 334	101 435 677
B. PENDAPATAN DAERAH	17 161 920	(49 069 309)
JUMLAH	490 629 864	786 058 669

Tabel 8. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	474 143 570	779 495 582
1. Belanja Tidak Langsung	239 116 063	355 375 802
1.1. Belanja Pegawai	210 947 028	255 091 497
1.2. Belanja Bunga	-	1 547 103
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	12 260 986	8 685 800
1.5. Belanja Bantuan Sosial	770 000	-
1.6. Belanja Bagi Hasil	-	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	14 342 329	88 805 296
1.8. Belanja Tidak Terduga	795 720	1 246 105
2. Belanja Langsung	235 027 507	424 119 780
2.1. Belanja Pegawai	19 072 220	33 020 164
2.2. Belanja Barang dan Jasa	104 315 464	148 677 708
2.3. Belanja Modal	111 639 823	242 421 908
B. PEMBIAYAAN DAERAH	16 486 294	6 563 087
JUMLAH	490 629 864	786 058 669

Tabel 9. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH	976 311 506	1 149 842 193
1. Pendapatan Asli Daerah / <i>Original</i>	66 747 551	70 168 822
1.1. Pajak Daerah	10 062 359	9 640 543
1.2. Retribusi Daerah	36 253 208	9 947 081
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 133 525	2 201 471
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah/	19 298 458	48 379 727
2. Dana Perimbangan	751 417 024	894 756 080
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	18 166 314	25 835 475
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8 910 559	-
2.3. Dana Alokasi Umum	642 281 901	678 031 865
2.4. Dana Alokasi Khusus	82 058 250	190 888 740
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	158 146 931	184 917 291
B. PENDAPATAN DAERAH	28 145 214	38 864 630
JUMLAH	1 004 456 720	1 188 706 823

Tabel 10. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	957 511 749	1 146 037 045
1. Belanja Tidak Langsung	524 187 990	625 504 556
1.1. Belanja Pegawai	476 555 071	519 797 406
1.2. Belanja Bunga	30 154	16 253
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	10 069 356	31 756 291
1.5. Belanja Bantuan Sosial	6 764 113	1 362 171
1.6. Belanja Bagi Hasil	977 166	1 798 421
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	29 594 496	70 223 053
1.8. Belanja Tidak Terduga	197 634	550 960
2. Belanja Langsung	433 323 759	520 532 488
2.1. Belanja Pegawai	29 110 514	30 457 149
2.2. Belanja Barang dan Jasa	218 332 768	313 593 985
2.3. Belanja Modal	185 880 477	176 481 354
B. PEMBIAYAAN DAERAH	46 944 971	42 669 779
JUMLAH	1 004 456 720	1 188 706 823

Tabel 11. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH	853 748 555	1 084 867 390
1. Pendapatan Asli Daerah / <i>Original</i>	57 736 188	59 927 053
1.1. Pajak Daerah	21 688 111	23 590 443
1.2. Retribusi Daerah	14 756 975	2 530 102
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 273 398	2 744 555
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20 017 704	31 061 953
2. Dana Perimbangan	661 470 140	842 198 740
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	17 702 851	22 535 408
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	6 745 639	-
2.3. Dana Alokasi Umum	573 670 222	604 513 881
2.4. Dana Alokasi Khusus	63 351 428	215 149 451
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	134 542 227	182 741 597
B. PEMBIAYAANDAERAH	43 907 907	59 360 934
JUMLAH	897 656 463	1 144 228 324

Tabel 12. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	836 295 592	1 052 255 555
1. Belanja Tidak Langsung	428 961 445	548 926 780
1.1. Belanja Pegawai	378 642 185	424 115 103
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	15 035 609	5 773 261
1.5. Belanja Bantuan Sosial	7 075 402	8 069 464
1.6. Belanja Bagi Hasil	1 439 322	1 367 626
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	24 193 297	109 002 819
1.8. Belanja Tidak Terduga	2 575 630	598 507
2. Belanja Langsung	407 334 147	503 328 775
2.1. Belanja Pegawai	39 343 627	43 295 854
2.2. Belanja Barang dan Jasa	184 101 598	199 807 037
2.3. Belanja Modal	183 888 922	260 225 884
B. PEMBIAYAAN DAERAH	61 360 870	91 972 769
JUMLAH	897 656 463	1 144 228 324

Tabel 13. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH	745 524 217	865 458 406
1. Pendapatan Asli Daerah	47 846 420	63 600 801
1.1. Pajak Daerah	6 673 845	7 945 933
1.2. Retribusi Daerah	20 409 853	3 075 115
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 171 771	2 423 565
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah/	19 590 951	50 156 188
2. Dana Perimbangan	636 127 768	670 921 263
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	17 611 161	18 906 674
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7 630 870	-
2.3. Dana Alokasi Umum	535 154 857	562 249 669
2.4. Dana Alokasi Khusus	75 730 880	89 764 920
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	61 550 029	130 936 342
B. PEMBIAYAAN DAERAH	35 056 599	36 454 801
JUMLAH	780 580 816	901 913 207

Tabel 14. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	724 609 872	865 617 496
1. Belanja Tidak Langsung	371 561 612	513 918 697
1.1. Belanja Pegawai	332 831 320	387 590 997
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	17 027 183	31 105 302
1.5. Belanja Bantuan Sosial	3 005 403	1 707 500
1.6. Belanja Bagi Hasil	-	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	16 808 106	91 849 407
1.8. Belanja Tidak Terduga	1 889 600	1 665 492
2. Belanja Langsung	353 048 260	351 698 799
2.1. Belanja Pegawai	33 752 455	39 204 732
2.2. Belanja Barang dan Jasa	155 121 225	168 708 859
2.3. Belanja Modal	164 174 579	143 785 208
B. PEMBIAYAAN DAERAH	55 970 944	36 295 711
JUMLAH	780 580 816	901 913 207

Tabel 15. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH	626 648 520	834 939 992
1. Pendapatan Asli Daerah / <i>Original</i>	35 113 224	45 986 409
1.1. Pajak Daerah	6 718 148	6 118 236
1.2. Retribusi Daerah	3 078 895	3 343 644
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 232 539	1 644 593
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah/	24 083 641	34 879 936
2. Dana Perimbangan	530 676 792	691 109 692
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	13 739 563	20 519 449
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8 691 531	-
2.3. Dana Alokasi Umum	454 371 723	472 180 193
2.4. Dana Alokasi Khusus	53 873 975	198 410 050
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	60 858 504	97 843 891
B. PEMBIAYAAN DAERAH	25 241 713	51 215 410
JUMLAH	651 890 232	886 155 402

Tabel 16. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	599 755 915	812 062 986
1. Belanja Tidak Langsung	292 859 781	377 549 234
1.1. Belanja Pegawai	267 411 159	291 837 720
1.2. Belanja Bunga	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	2 614 556	579 403
1.5. Belanja Bantuan Sosial	5 000	5 175 906
1.6. Belanja Bagi Hasil	470 925	776 029
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	21 574 807	78 967 069
1.8. Belanja Tidak Terduga	783 335	213 107
2. Belanja Langsung	306 896 134	434 513 752
2.1. Belanja Pegawai	37 890 638	43 624 868
2.2. Belanja Barang dan Jasa	129 753 332	135 002 362
2.3. Belanja Modal	139 252 164	255 886 522
B. PEMBIAYAAN DAERAH	52 134 318	74 092 417
JUMLAH	651 890 232	886 155 402

Tabel 17. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH	973 572 702	1 168 381 291
1. Pendapatan Asli Daerah / <i>Original</i>	76 559 867	77 841 890
1.1. Pajak Daerah	8 377 387	9 638 978
1.2. Retribusi Daerah	6 394 678	5 130 521
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 678 824	1 612 936
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah/	60 108 978	61 459 455
2. Dana Perimbangan	765 664 882	862 588 693
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	15 614 756	34 011 132
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	6 736 730	-
2.3. Dana Alokasi Umum	660 265 526	692 805 521
2.4. Dana Alokasi Khusus	83 047 870	135 772 040
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	131 347 953	227 950 708
B. PENDAPATAN DAERAH	53 743 518	76 338 702
JUMLAH	1 027 316 220	1 244 719 993

Tabel 18. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	948 410 854	1 187 517 569
1. Belanja Tidak Langsung	471 174 747	635 730 308
1.1. Belanja Pegawai	415 853 234	473 159 237
1.2. Belanja Bunga	1 417 143	1 197 486
1.3. Belanja Subsidi	0	-
1.4. Belanja Hibah	8 400 400	5 033 053
1.5. Belanja Bantuan Sosial	15 320 515	497 500
1.6. Belanja Bagi Hasil	0	1 189 816
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	28 320 257	153 956 344
1.8. Belanja Tidak Terduga	1 863 198	696 872
2. Belanja Langsung	477 236 107	551 787 261
2.1. Belanja Pegawai	61 107 612	62 648 690
2.2. Belanja Barang dan Jasa	209 189 516	230 484 445
2.3. Belanja Modal	206 938 979	258 654 126
B. PEMBIAYAAN DAERAH	78 905 366	57 202 424
JUMLAH	1 027 316 220	1 244 719 993

Tabel 19. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH	713 753 995	909 868 051
1. Pendapatan Asli Daerah	43 985 661	49 782 668
1.1. Pajak Daerah	5 473 897	8 293 948
1.2. Retribusi Daerah	23 946 434	23 941 551
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 018 579	2 190 136
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah/	13 546 751	15 357 033
2. Dana Perimbangan	589 259 635	739 927 709
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	15 056 394	13 171 650
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	16 030 192	12 506 617
2.3. Dana Alokasi Umum	482 416 599	509 717 712
2.4. Dana Alokasi Khusus	75 756 450	204 531 730
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	80 508 699	120 157 674
B. PENDAPATAN DAERAH	47 567 285	64 084 074
JUMLAH	761 321 280	973 952 125

Tabel 20. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	697 251 560	909 636 793
1. Belanja Tidak Langsung	281 181 434	395 110 904
1.1. Belanja Pegawai	247 555 591	277 792 625
1.2. Belanja Bunga	0	-
1.3. Belanja Subsidi	500 000	444 176
1.4. Belanja Hibah	6 552 832	26 508 962
1.5. Belanja Bantuan Sosial	429 000	534 680
1.6. Belanja Bagi Hasil	499 410	577 121
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	22 684 101	89 219 926
1.8. Belanja Tidak Terduga	2 960 500	33 414
2. Belanja Langsung	416 070 126	514 525 889
2.1. Belanja Pegawai	43 925 075	49 914 620
2.2. Belanja Barang dan Jasa	167 047 377	178 822 237
2.3. Belanja Modal	205 097 674	285 789 032
B. PEMBIAYAAN DAERAH	64 069 720	64 315 332
JUMLAH	761 321 280	973 952 125

Tabel 21. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH	761 741 007	933 843 013
1. Pendapatan Asli Daerah	23 589 608	25 506 504
1.1. Pajak Daerah	7 708 525	7 278 870
1.2. Retribusi Daerah	3 017 837	3 694 069
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	189 652	329 178
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12 673 594	14 204 387
2. Dana Perimbangan	650 354 203	748 280 915
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	15 198 420	11 211 984
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	6 514 555	6 411 291
2.3. Dana Alokasi Umum	561 491 658	595 913 672
2.4. Dana Alokasi Khusus	67 149 570	134 743 968
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	87 797 196	160 055 594
B. PENDAPATAN DAERAH	29 564 245	43 681 793
JUMLAH	791 305 252	977 524 806

Tabel 22. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	747 623 459	840 204 368
1. Belanja Tidak Langsung	379 845 317	436 038 606
1.1. Belanja Pegawai	350 511 871	402 626 238
1.2. Belanja Bunga	0	-
1.3. Belanja Subsidi	0	-
1.4. Belanja Hibah	2 745 000	29 471 960
1.5. Belanja Bantuan Sosial	1 515 050	2 565 000
1.6. Belanja Bagi Hasil	0	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	23 494 776	-
1.8. Belanja Tidak Terduga	1 578 620	1 375 408
2. Belanja Langsung	367 778 142	404 165 762
2.1. Belanja Pegawai	49 549 537	40 893 986
2.2. Belanja Barang dan Jasa	160 077 041	160 982 047
2.3. Belanja Modal	158 151 564	202 289 729
B. PEMBIAYAAN DAERAH	43 681 793	137 320 438
JUMLAH	791 305 252	977 524 806

Tabel 23. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH	209 722 247	464 487 461
1. Pendapatan Asli Daerah	5 842 181	12 290 012
1.1. Pajak Daerah	1 167 000	2 262 838
1.2. Retribusi Daerah	3 971 931	4 338 462
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	-
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah/	703 250	5 688 711
2. Dana Perimbangan	166 794 660	400 418 678
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	5 211 792	7 550 614
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3 107 857	2 959 852
2.3. Dana Alokasi Umum	153 501 061	325 941 229
2.4. Dana Alokasi Khusus	4 973 950	63 966 984
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	37 085 406	51 778 771
B. PENDAPATAN DAERAH	0	17 950 373
JUMLAH	209 722 247	482 437 834

Tabel 24. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	209 722 247	405 148 568
1. Belanja Tidak Langsung	104 169 480	128 273 796
1.1. Belanja Pegawai	96 593 858	107 547 664
1.2. Belanja Bunga	0	-
1.3. Belanja Subsidi	0	-
1.4. Belanja Hibah	2 137 500	18 726 132
1.5. Belanja Bantuan Sosial	445 000	2 000 000
1.6. Belanja Bagi Hasil	0	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	4 893 122	-
1.8. Belanja Tidak Terduga	100 000	-
2. Belanja Langsung	105 552 767	276 874 772
2.1. Belanja Pegawai	11 881 286	20 476 128
2.2. Belanja Barang dan Jasa	42 976 692	79 941 088
2.3. Belanja Modal	50 694 789	176 457 557
B. PEMBIAYAAN DAERAH	0	77 289 266
JUMLAH	209 722 247	482 437 834

Tabel 25. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH	516 779 813	703 807 802
1. Pendapatan Asli Daerah	40 673 134	37 975 047
1.1. Pajak Daerah	22 520 679	12 824 026
1.2. Retribusi Daerah	13 494 783	12 294 905
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	-
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah/	4 657 672	12 856 115
2. Dana Perimbangan	431 108 113	570 400 700
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	16 005 772	32 218 304
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	19 654 590	-
2.3. Dana Alokasi Umum	395 447 752	499 809 149
2.4. Dana Alokasi Khusus	0	38 373 247
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	44 998 565	95 432 056
B. PENDAPATAN DAERAH	6 000 000	35 070 720
JUMLAH	522 779 813	738 878 522

Tabel 26. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	476 566 074	690 649 889
1. Belanja Tidak Langsung	204 798 050	345 610 511
1.1. Belanja Pegawai	189 057 550	227 488 568
1.2. Belanja Bunga	0	-
1.3. Belanja Subsidi	0	-
1.4. Belanja Hibah	1 211 900	21 709 970
1.5. Belanja Bantuan Sosial	0	1 175 100
1.6. Belanja Bagi Hasil	0	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	14 528 600	94 693 723
1.8. Belanja Tidak Terduga	0	543 150
2. Belanja Langsung	271 768 024	345 039 378
2.1. Belanja Pegawai	15 821 071	25 778 873
2.2. Belanja Barang dan Jasa	95 443 538	108 633 840
2.3. Belanja Modal	160 503 415	210 626 665
B. PEMBIAYAAN DAERAH	46 213 739	48 228 632
JUMLAH	522 779 813	738 878 522

Tabel 27. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENDAPATAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 184 387 361	1 324 406 534
1. Pendapatan Asli Daerah	236 925 961	253 977 957
1.1. Pajak Daerah	79 075 428	88 272 568
1.2. Retribusi Daerah	42 570 645	16 011 920
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	791 714	1 315 331
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah/	114 488 174	148 378 138
2. Dana Perimbangan	713 713 950	832 972 207
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak	5 095 177	20 343 992
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	9 543 115	5 797 573
2.3. Dana Alokasi Umum	637 378 278	652 407 682
2.4. Dana Alokasi Khusus	61 697 380	154 422 960
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	233 747 450	237 456 370
B. PENDAPATAN DAERAH	47 567 284	15 184 424
JUMLAH	1 231 954 645	1 339 590 958

Tabel 28. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2014 – 2015 (ribu rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2014	2015
(1)	(3)	(4)
A. Belanja Daerah	1 198 133 066	1 309 222 111
1. Belanja Tidak Langsung	596 151 485	684 110 238
1.1. Belanja Pegawai	569 255 171	630 930 797
1.2. Belanja Bunga	6 046 411	7 060 781
1.3. Belanja Subsidi	0	-
1.4. Belanja Hibah	14 332 289	36 933 093
1.5. Belanja Bantuan Sosial	4 850 198	7 540 660
1.6. Belanja Bagi Hasil	0	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	324 615	537 762
1.8. Belanja Tidak Terduga	1 342 801	1 107 145
2. Belanja Langsung	601 981 581	625 111 872
2.1. Belanja Pegawai	59 559 865	60 471 331
2.2. Belanja Barang dan Jasa	273 762 117	319 975 555
2.3. Belanja Modal	268 659 599	244 664 986
2. PEMBIAYAAN DAERAH	33 821 579	30 368 847
JUMLAH	1 231 954 645	1 339 590 958

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jln. Prof. Moh. Yamin SH. No. 48 Palu 94114
Telepon (0451) 483610, 483611, Fax (0451) 483612
website: <http://sulteng.bps.go.id>; email: bps7200@bps.go.id

ISSN 2354-7456



9 772354 745685